

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Myanmar, juga dikenal sebagai Burma merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Negara ini memiliki populasi sekitar 54 juta dari beragam etnis, termasuk Burman, Karen, Shan, dan Rohingya. Pada masa lalu, Myanmar dijajah oleh negara Inggris dan baru mendapatkan kemerdekaannya pada tanggal 4 Januari 1948. Akan tetapi sejak tahun 1948 hingga saat ini, pertikaian internal di Myanmar masih belum ada penyelesaian sehingga sudah banyak korban yang berjatuh pada konflik tersebut. Negara dengan luas wilayah 676.578 km<sup>2</sup> ini sudah diperintah oleh pemimpin militer sejak kudeta yang dilakukan pada tahun 1988.<sup>1</sup> Oleh kudeta junta militer, agar etnis non-burma dapat menjadi bagian dari negara, maka nama negara resmi diubah dari Burma menjadi Myanmar pada tanggal 18 Juni 1989. Ibukota Myanmar yang semula berada di Yangon dipindahkan ke Naypyidaw.<sup>2</sup>

Meskipun demikian, perilaku para pemimpin militer ini menjadi kontroversial bagi penduduk asli di Myanmar sehingga perang saudara pun terjadi. Kekacauan di Myanmar yang sudah terjadi sejak dahulu hingga saat ini masih belum terselesaikan. Tidak sedikit korban yang berjatuh dalam peristiwa

---

<sup>1</sup>Aljauhari, Bustomy Rifa. *Letak Astronomis dan Geografis Myanmar Beserta Perbatasannya*. November 8, 2017. <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/letak-astronomis-dan-geografis-myanmar>.

<sup>2</sup>Mitzy, Gulia Ichikaya. "Perlawanan Etnis Muslim Rohingya terhadap Kebijakan Diskriminatif." *Indonesian Journal of International Studies (IJIS)*, 2017: 153-162.

tersebut, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi penduduk Myanmar. Konflik dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Myanmar telah menjadi pusat perhatian bukan hanya kawasan Asia Tenggara saja, namun secara global.

Myanmar berada di bawah kekuasaan militer selama lebih dari lima dekade hingga 2011. Berakhir setelah junta militer (pemerintah) dibubarkan, dan pemerintahan sipil didirikan. Kemudian pemilihan demokratis berlangsung, Partai *National League for Democracy* (NLD) memenangkan mayoritas kursi di Parlemen. Aung San Suu Kyi, mantan tahanan politik dan pemimpin NLD, memimpin pemerintahan sebagai Penasihat Negara dan Perdana Menteri *de facto* sampai dia digulingkan dalam kudeta militer di tahun 2021. Pada tanggal 1 Februari 2021, militer melakukan kudeta, menuduh bahwa pemilihan November 2020, yang dimenangkan NLD dengan kemenangan telak, sebagai pemilu yang curang.<sup>3</sup> Militer merebut kekuasaan, menahan Aung San Suu Kyi, dan para pemimpin pemerintah lainnya, menuduh mereka melakukan kecurangan pemilu. Militer membentuk pemerintahan baru, tetapi masyarakat internasional sebagian besar menolak untuk mengakuinya, menyerukan pemulihan pemerintah terpilih.

Kudeta itu memicu protes langsung di seluruh Myanmar, dengan warga menolak mengakui rezim militer. Tanggapan militer terhadap protes damai sangat brutal, dengan laporan pasukan keamanan menggunakan amunisi hidup, peluru karet, gas air mata, meriam air, dan granat kejut untuk membubarkan pengunjuk rasa. Selain itu, militer menutup internet dan outlet media sosial, memblokir

---

<sup>3</sup>Sebayang, Rehia. Kronologi Lengkap Kudeta Myanmar yang Picu Demo Berdarah. Jakarta: IDN TIMES, 2021.

saluran berita, dan memberlakukan jam malam dan pembatasan pertemuan publik.<sup>4</sup> Terlepas dari kecaman internasional, rezim militer terus melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia. Militer telah melakukan pembunuhan sehingga melanggar hukum dan hak asasi manusia, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, kekerasan seksual, dan penghilangan paksa. Selain itu, ada laporan tentang pasukan militer yang melancarkan serangan udara dan darat terhadap kelompok etnis minoritas, seperti Rohingya, Karen, dan Kachin. Masyarakat internasional telah secara luas memberikan ganjaran kepada para pelaku yang telah melanggar hak asasi manusia.

Negara-negara, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Uni Eropa, telah menjatuhkan sanksi terhadap militer Myanmar dan para pemimpinnya, membekukan aset mereka dan melarang mereka bepergian ke luar negeri.<sup>5</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyerukan diakhirinya tindakan keras militer dan telah berulang kali mendesak militer untuk memulihkan pemerintahan yang demokratis. Situasi di Myanmar masih belum pasti, dengan militer tidak menunjukkan tanda-tanda menyerahkan kekuasaan. Negara ini menghadapi krisis ekonomi, dengan Bank Dunia memperkirakan kontraksi hingga 10% untuk tahun 2021, dan pandemi COVID-19 memperburuk situasi. Tindakan militer telah

---

<sup>4</sup>Wulandari, Veronika. "Perlakuan Pemerintah Myanmar Terhadap Minoritas Muslim Rohingya Persepektif Sejarah dan Hukum Internasional." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2022: 51-68.

<sup>5</sup>Sandhika, Hagi Mulya. "Peran ASEAN dan PBB dalam Mendorong Proses Demokratisasi di Myanmar Pasca Kudeta Militer 2021." *Journal on Education*, 2023: 15681-15688.

menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan politik dan sosial, dengan puluhan ribu warga mengungsi, dan reformasi pemerintah sipil berisiko besar.<sup>6</sup>

Ada beberapa kemungkinan hal buruk yang akan terjadi dalam Myanmar sendiri jika konflik ini tidak berhenti, yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang terus berlanjut dapat menyebabkan kerusuhan sipil dan protes yang terus berlanjut oleh penduduk. Kurangnya penyelesaian dan akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia dapat memicu kemarahan, frustrasi, dan rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat, yang berpotensi mengakibatkan ketidakstabilan sosial yang berkelanjutan. Bukan hanya dari internal saja, namun konsekuensi terhadap eksternal juga ada, dimana Myanmar dapat menghadapi peningkatan isolasi internasional dan sanksi ekonomi jika krisis hak asasi manusia terus berlanjut. Komunitas internasional, termasuk pemerintah, organisasi, dan bisnis, dapat menjatuhkan sanksi atau pembatasan perdagangan, investasi, dan hubungan diplomatik. Isolasi ini dapat memperburuk tantangan ekonomi dan menghambat pembangunan negara. Hal ini juga dapat menyebabkan keresahan serta ketidaknyamanan bagi negara-negara sekitar Myanmar dikarenakan krisis hak asasi manusia yang sedang berlangsung dapat menyebabkan peningkatan pengungsian internal dan pengungsi yang mencari tempat aman di negara-negara tetangga, yang mana hal ini akan menjadi beban

---

<sup>6</sup>Headey, Derek, Sophie Goudet, Isabel Lambrecht, Elisa Maria Maffioli, Than Zaw Oo, and Toth Russell. "Poverty and food insecurity during COVID-19: Phone-survey evidence from rural and urban Myanmar in 2020." *Global Food Security*, 2022: 2-16.

bagi Myanmar dan negara-negara yang menampung para pengungsi, yang berpotensi membebani sumber daya dan menciptakan ketegangan regional.

Berlanjutnya pelanggaran hak asasi manusia dapat menghambat pembangunan sosial-ekonomi Myanmar. Investor dan bisnis mungkin enggan untuk terlibat di negara ini, sehingga membatasi peluang pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, dampaknya terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan layanan sosial lainnya dapat semakin merusak kesejahteraan penduduk. Lalu, tidak adanya pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia dapat mengikis kepercayaan di antara berbagai kelompok etnis dan agama di Myanmar. Hal ini dapat menghambat upaya rekonsiliasi nasional, memperburuk ketegangan etnis, dan menghalangi pembentukan masyarakat yang inklusif dan kohesif, sehingga hal ini dapat menimbulkan konflik yang sama di negara lainnya pada masa mendatang.<sup>7</sup>

Sebagai anggota ASEAN sejak 1997, konflik dengan pelanggaran HAM di Myanmar juga telah menjadi salah satu fokus utama bagi institusi regional ASEAN untuk dituntaskan serta sudah menjadi tanggung jawab dari ASEAN untuk membantu negara anggotanya. ASEAN merupakan organisasi kawasan regional yang terdiri dari 11 negara Asia Tenggara. Tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan kerja sama ekonomi dan keamanan regional dengan membina lingkungan yang damai dan stabil di wilayah tersebut. Salah satu prinsip utama organisasi adalah promosi resolusi konflik damai melalui dialog

---

<sup>7</sup>Ebbighausen, Rodion. *Setahun Setelah Kudeta, Nasib Myanmar Semakin Tidak Menentu*. Jakarta: DW (Made for Minds), 2022.

dan pembangunan konsensus.<sup>8</sup> Sesungguhnya, situasi di Myanmar berpotensi memberikan dampak yang kurang baik pada keseimbangan kekuatan regional. Saat ini, junta militer telah membuat tegang hubungan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, termasuk Thailand, yang secara tradisional menawarkan dukungan kepada militer Burma. Sementara itu, hubungan Myanmar dengan tetangganya Bangladesh dan India juga terkena dampak buruk. Salah satu risiko terbesar dari konflik di Myanmar adalah potensi limpahan ke negara-negara tetangga. Krisis Rohingya telah menunjukkan potensi konflik menyebar melintasi perbatasan, dan meningkatnya kekerasan di Myanmar dapat memperburuk ketegangan di wilayah tersebut.<sup>9</sup> Krisis kemanusiaan yang berkembang yang diciptakan oleh konflik juga telah mendorong ribuan orang melarikan diri ke negara-negara tetangga, mengancam akan mengacaukan kawasan itu lebih lanjut. ASEAN dapat memperlihatkan kredibilitas dari sebuah institusi regional dalam melakukan pencegahan terhadap resiko yang lebih besar dari konflik Myanmar ini. ASEAN telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi krisis yang sedang berlangsung di Myanmar, termasuk pembentukan Pusat Koordinasi

Bantuan Kemanusiaan ASEAN, mencegah kudeta militer, dan memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang terlibat.<sup>10</sup> Apakah langkah-langkah ini efektif dalam menyelesaikan krisis masih harus dilihat. Namun, sebagai

---

<sup>8</sup>Zulfikar, Fahri. *Sejarah Singkat ASEAN Beserta Latar Belakang dan Tujuannya*. Jakarta: detikEdu, 2021.

<sup>9</sup>Yasyid, Fasha Nabila. "*Dampak Pengusiran Etnis Rohingya oleh Myanmar Terhadap Keamanan Bangladesh*." *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 2017: 1287 - 130.

<sup>10</sup>Madu, Ludiro. *Penguatan ASEAN dalam Penyelesaian Krisis Myanmar*. Jakarta: Kompasiana, 2022.

organisasi regional yang berkomitmen untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan ini, peran ASEAN dalam menemukan resolusi damai untuk krisis Myanmar sangat penting, dan upayanya yang berkelanjutan dapat berkontribusi positif terhadap masa depan yang lebih damai bagi negara tersebut. Begitupun pada aspek ekonomi, ASEAN juga telah menciptakan kebijakan non-tarif, implementasi *self-certification*, *ASEAN Trade Repository*, *ASEAN Single Window*, serta perkembangan standart dan kesesuaian agar tetap bisa menjaga perekonomiannya.<sup>11</sup>

## 1.2 Rumusan Masalah

Konflik HAM yang ada di Myanmar sudah menjadi salah satu kasus yang bersifat darurat meskipun secara umum konflik Myanmar terkadang dianggap hanya tentang pertikaian level domestik, namun uniknya konflik yang hanya dianggap pada level domestik ini dapat memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap negara yang lain seperti, ancaman terhadap stabilitas bagi negara-negara yang ada di Kawasan Asia Tenggara.

Tidak hanya itu, konflik ini dapat mempertanyakan eksistensi ASEAN sebagai organisasi regional dalam menangani krisis kemanusiaan. Dengan ini, berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis telah merangkai perumusan masalah yakni sebagai berikut:

---

<sup>11</sup>Administrator. *Tarif Preferensi Free Trade Agreement (FTA)*. June 27, 2019. <https://indonesia.go.id/layanan/perdagangan/ekonomi/tarif-preferensi-free-trade-agreement-fta>.

1. Bagaimana pelanggaran HAM di Myanmar dapat menjadi tantangan bagi regionalisme ASEAN?
2. Apa inisiatif yang dilakukan oleh ASEAN dalam menghadapi pelanggaran HAM di Myanmar?
3. Apa yang menjadi hambatan bagi ASEAN ketika melakukan inisiatif penanganan pelanggaran HAM di Myanmar?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibentuk, maka penulis ingin mencapai beberapa tujuan sebagai berikut, yaitu yang pertama untuk mengetahui serta menganalisis tentang kondisi Myanmar ketika konflik HAM ini terjadi. Lalu yang kedua, untuk mengetahui serta menganalisis mengenai dampak terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang ditimbulkan oleh konflik HAM di Myanmar. Selain dari melihat dari tanggapan setiap negara di Kawasan Asia Tenggara, penulis ingin menganalisis mengenai dampak terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang ditimbulkan oleh konflik HAM di Myanmar.

Setelah mendapatkan respon dari ASEAN, penulis ingin mengetahui serta menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh ASEAN dalam menangani konflik HAM di Myanmar dalam menangani konflik tersebut, serta yang terakhir untuk mengetahui serta menganalisis tantangan maupun hambatan yang dilalui oleh ASEAN ketika melaksanakan upaya-upaya tersebut.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka manfaat penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah yang pertama hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemaparan yang jelas mengenai kronologi serta alasan konflik HAM di Myanmar itu terjadi, lalu hasil dari penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana pihak internasional ini menanggapi serta mengemukakan ide-idenya untuk pertahanan dari konflik HAM di Myanmar.

Setelah itu yang ketiga yakni hasil dari penelitian ini dapat menjelaskan apa yang menjadi ancaman terhadap negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara ketika konflik HAM di Myanmar sedang terjadi. Setelah melihat hasil dari respon serta ancaman bagi negara ASEAN, penulis ingin menjelaskan hasil dari penelitian ini dapat menunjukkan semua upaya serta tantangan yang dialami ASEAN dalam menangani konflik HAM di Myanmar ini. Dan yang terakhir, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan keefektifan dari upaya yang telah dilaksanakan oleh ASEAN serta masukan untuk upaya ASEAN kedepannya bagi konflik HAM di Myanmar.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Pada Bab I: Pendahuluan, penulis akan menjelaskan latar belakang mengenai informasi singkat mengenai negara Myanmar serta bagaimana perjalanan sistem pemerintahan Myanmar sejak awal ketika bebas dari penjajahan Inggris pada tanggal 4 Januari 1948 hingga akhirnya terjadi kudeta

dari rezim militer pada 1 Februari 2021 yang mengakibatkan pelanggaran HAM terhadap masyarakat Myanmar.

Pada Bab II: Kerangka Berpikir, penulis mengambil beberapa sumber dari jurnal-jurnal yang memiliki topik yang kurang lebih sama seperti topik dalam penelitian ini. Dalam pengambilan jurnal, penulis mengkategorikan judul-judul yang telah didapat menjadi 3 kategori: 1) Peran ASEAN sebagai peran utama dalam penanganan konflik di Myanmar. 2) Upaya-upaya yang dilakukan oleh ASEAN; dan 3) Tantangan internal maupun eksternal yang dihadapi oleh ASEAN.

Dalam Bab III: Metodologi, dalam bab ini akan membahas metodologi yang akan digunakan. Penulis akan menjelaskan dimulai dari jenis pendekatan penelitian yang akan digunakan, metode penelitian, lalu bagaimana data akan dikumpulkan, serta bagaimana data tersebut akan dianalisis.

Dalam Bab IV: Analisis, penulis akan menjelaskan bagaimana awal mula terjadinya kudeta di Myanmar yang bermula dari konflik internal yang muncul setelah Myanmar Merdeka dari Inggris. Lalu, ketika kudeta itu terjadi mengakibatkan pelanggaran HAM sehingga ASEAN harus dengan sigap menangani konflik tersebut dengan berbagai tantangan yang ada.

Terakhir, Bab V: Penutup, penulis telah memberikan sebuah kesimpulan dan saran berdasarkan latar belakang sampai dengan hasil analisis yang telah diteliti sehingga dapat merangkum keseluruhan dari topik penelitian ini dengan padat dan jelas.